



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
LAPORAN SINGKAT
RDP PANJA PENGANGKATAN GTK HONORER MENJADI ASN
KOMISI X DPR RI
**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021.
Masa Sidang ke-	: IV (Empat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: 1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2. Pemerintah Provinsi Papua 3. Pemerintah Provinsi Banten 4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 5. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Hari/Tanggal	: Selasa, 23 Maret 2021
Pukul	: 09.00 – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Agenda acara	: 1. Membahas Basis data GTK Honorers, Sebaran Wilayah Penugasan dan Jumlah Murid; 2. Permasalahan GKT Honorers; 3. Pandangan, Masukan dan Evaluasi Proses Pengangkatan GTK Honorers menjadi ASN.
Hadir Komisi X DPR RI	: 18 orang dari 30 orang anggota Panja Pengangkatan GTK Honorers Menjadi ASN Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si (Gubernur Kaltim) 2. Christian Sohilit, ST, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua) 3. Dr. H.Tabrani, M.Pd (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten) 4. Linus Lusi, M.Pd (Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT) 5. Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 09.00 WIB oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI), setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber, serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si, Christian Sohilait, ST, M.Si, Dr. H.Tabrani, Adelino Soares, Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN (*bahan tertulis terlampir*), antara lain:

1. Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si (Gubernur Kalimantan Timur) , menyampaikan antara lain:
 - a. Sudah ada sosialisasi yang disampaikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan skema penganggaran untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta PPPK, akan tetapi sampai saat ini belum mendapatkan aturan legal formal.
 - b. Berharap ada perlakuan khusus dalam seleksi PPPK terutama terhadap Guru yang lama mengabdikan dan terbatas dalam akses informasi dan teknologi.
 - c. Mengusulkan ada komponen atau variable kesejahteraan guru yang akan ditugaskan ke daerah 3T.
2. Christian Sohilait, ST, M.Si. (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua) menyampaikan antara lain:
 - a. Tata kelola pendidikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih sedikit terhambat dengan adanya dualisme implementasi undang-undang di Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua mengacu pada UU 21 tahun 2001 tentang OTSUS Papua dan Pemerintah Pusat mengacu pada UU 32 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sehingga dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan sering kurang sinkron ketika dikonsultasikan ke Kemendikbud, Kemendagri maupun Kemenkeu RI.

- b. Sampai saat ini belum ada informasi kebijakan yang secara jelas mengenai anggaran untuk pembayaran gaji guru honorer yang akan diangkat menjadi PPPK.
 - c. Dalam pengangkatan Guru ASN semua penyandang disabilitas disatukan, tidak ada pengecualian. Dinas pendidikan belum menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas di Papua.
3. Dr. H. Tabrani, M.Pd (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten) menyampaikan antara lain:
- a. Mendorong pemerintah untuk membuat mekanisme dan regulasi secara tertulis tentang skema anggaran yang jelas untuk pengangkatan PPPK dan dilakukan sosialisasi lebih awal ke pemerintah daerah.
 - b. Masih ada GTK Honorer K1 yang masih belum diangkat menjadi ASN
 - c. Ada sekitar 7 ribu guru honorer di sekolah negeri dan 16 ribu di sekolah swasta, sementara masih ada kebutuhan sekitar 11 ribu guru. Mengajukan 1.300 PPPK.
 - d. Perlu ada formula agar guru yang terseleksi tetap terjaga kualitasnya.
4. Adelino Soares (Kabid GTK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT) menyampaikan antara lain:
- a. Kordinasi dengan pemerintah dilakukan dengan cukup efektif baik dengan Kemendikbud, KemenpanRB, BKN dan BKD. Khusus untuk PPPK sudah melakukan rapat kordinasi pada bulan Desember tahun 2020.
 - b. Pemprov NTT sudah mengirimkan usulan sebanyak 9.885 namun menyayangkan belum terakomodirnya Tenaga Kependidikan dan guru agama dalam formasi seleksi PPPK tahun 2021.
 - c. Mendapatkan informasi secara lisan untuk rekrutmen PPPK 2021 dibiayai oleh pemerintah pusat, berharap agar tunjangannya juga mendapatkan dukungan.
 - d. Penekanan kembali kepada hal afirmasi di daerah-daerah untuk guru-guru yang pengalaman dan pengabdian lebih lama agar menjadi prioritas pengangkatan PPPK.
 - e. Belum menemukan formasi khusus untuk penyandang disabilitas dalam seleksi PPPK tahun 2021.
5. Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur) menyampaikan antara lain:
- a. Meminta pengelolaan pengangkatan PPPK disesuaikan dengan kebutuhan di daerah dan kepastian anggaran pengangkatannya.
 - b. Telah mengirimkan usulan sebanyak 14.223 formasi PPPK 2021.

- c. Proses pengangkatan PPPK untuk guru honorer agar ditempatkan di sekolah asal atau induk baik sekolah negeri maupun swasta.
 - d. Pengangkatan guru honorer memprioritaskan yang sudah memiliki sertifikasi pendidik.
 - e. Mengusulkan untuk perekrutan guru agama dan guru bahasa daerah dan mengakomodir Tenaga kependidikan.
- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendesak pemerintah secara cepat dan masif untuk memberikan sosialisasi dan pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan skema penganggaran untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta PPPK tahun 2021 serta melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait.
 2. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk membuat kebijakan dengan mengutamakan afirmasi (usia, lama masa pengabdian, pengalaman pengabdian di daerah 3T, sekolah kebutuhan khusus, dan kriteria tertentu lainnya) dalam seleksi program 1 juta PPPK tahun 2021.
 3. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk membuka formasi bagi guru agama, guru olahraga, guru kesenian, guru muatan lokal, dan guru sekolah inklusi serta Tenaga Kependidikan dalam seleksi program 1 juta PPPK tahun 2021.
 4. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah dalam melaksanakan seleksi program 1 juta PPPK memperhatikan komitmen guru terhadap Pancasila, NKRI dan tidak terpapar paham radikalisme serta tidak terlibat dalam organisasi terlarang.
 5. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah agar memisahkan formasi pengangkatan GTK Honorer dengan seleksi untuk formasi lainnya.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.30 WIB

KETUA RAPAT,

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM.